



Analisis Pancasila di Tengah Badai Digital

Bernardus Agus Rukiyanto

SETIAP 1 Oktober, kita kembali merenungi makna Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini, yang lahir dari tragedi Gerakan 30 September (G30S/PKI), selalu menegaskan satu hal: Pancasila adalah ideologi yang tak tergoyahkan. Namun, jika pada masa lalu "kesaktian" Pancasila teruji oleh rongrongan komunisme, di era kontemporer, Pancasila ditantang oleh musuh yang lebih senyap, namun lebih masif: badai digital dan krisis etika publik.

* Bersambung hal 9 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:32	14:40	17:37	18:45	04:08

Rabu, 1 Oktober 2025 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

TIKET GRATIS*
1 Oktober 2025

PAMERAN KOMPUTER & IT
TERBESAR, TERLENGKAP, TERKINI

Zona AI, Workshop, Aneka lomba & Doorprize
HADIR DI GIK UGM 27 Sept - 01 Oct 2025

KOMPETISI:

- 📷 Foto
- 🕺 KPOP Dance
- 🎵 Reels
- 🏎️ Speed Drawing
- 🎸 Band
- 🎮 E-Sports

KOMPETISI:

- 📺 Pameran IT & Komik
- 🎧 AI Experience Zone
- 🎨 Workshop AI & Komik

*GUNTING IKLAN INI TUKARKAN KE TICKET BOX DENGAN 1 (SATU) VOUCHER TIKET MASUK YOGYAKOMTEK 2025 dengan sebelumnya mengisi link berikut <https://apkompjogja.org/tiket/voucher>

*Tiket berlaku untuk hari yang sama

JCW Dorong Bongkar Keterlibatan Pihak Lain

Sri Purnomo Tersangka Dana Hibah Pariwisata

SLEMAN (KR) - Mantan Bupati Sleman Drs Sri Purnomo MSI (SP) ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi hibah pariwisata 2020 oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Bupati dua periode, 2010-2015 dan 2016-2021 diduga merugikan negara sekitar Rp 10,9 miliar.

"Kami menaikkan status SP dari saksi menjadi tersangka. Hal itu berdasarkan saksi ahli dan surat-surat. Penetapan tersangka dihitung sejak Selasa (30/9)," ungkap Kajari Sleman Bambang Yuniyanto, Selasa (30/9).

Dikatakan Kajari, tersangka diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah Pariwisata Tahun 2020. Dimana tahun 2020 Kabupaten Sleman memperoleh hibah dari Kementerian



Sri Purnomo

Keuangan sebesar Rp 68,5 miliar dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Pengaturannya diatur dalam aturan menteri keuangan nomor 46/pmk/07/2020. "Dari hasil hasil pe-

nyidikan ditemukan tersangka telah memberikan dana hibah untuk kelompok masyarakat yang bertentangan dengan perjanjian hibah," kata Bambang. * Bersambung hal 9 kol 5

PENANGGUNGJAWAB PROGRAM MBG Guru Dapat Insentif Rp 100.000/Hari

JAKARTA (KR) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan memberi insentif bagi guru yang menjadi penanggung jawab Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 100.000 perhari. Insentif akan cairkan setiap 10 hari sekali, seperti tertuang dalam Surat Edaran (SE) BGN Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif bagi Guru Penanggung Jawab Program MBG di Sekolah Penerima Manfaat.

"Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar melaksanakan dan mengawasi pemberian insentif kepada setiap guru yang telah ditunjuk," kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (30/9).

Dijelaskan, dana insentif yang bersumber dari biaya operasional SPPG sekolah terkait merupakan kebijakan yang lahir sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap peran strategis guru dalam mendukung keberhasilan program yang ditujukan untuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Guru dinilai memiliki peran vital tidak hanya

sebagai pendamping utama siswa, tetapi juga sebagai penggerak dalam menanamkan pemahaman tentang pentingnya pola makan sehat dan perilaku hidup bersih di lingkungan sekolah. "Pemberian insentif ini bukan sekadar kompensasi finansial, melainkan bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusi guru dalam mendukung keberhasilan program," ujar Nanik.

Dikatakan pula, SE tersebut mewajibkan setiap sekolah penerima manfaat MBG untuk menunjuk 1-3 orang guru sebagai penanggung jawab distribusi

* Bersambung hal 9 kol 5



● SABTU 27 September 2025 saya ke Yogyakarta naik Kereta Api Prameks dan pulang naik KA Bandara. Saat pulang sampai di Stasiun Wates, saya bingung mencari sepeda motor saya tidak ada. Setelah cukup lama baru teringat kalau saya parkir di sebelah timur, dekat tempat keberangkatan KA Prameks. (Galih SP, Sentolo Kulonprogo)-f

DPRD DIY PANTAU LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN:

Syarief Guska Laksana : Warga DIY Harus Mudah Dapat Identitas



FORUM DPRD DIY

IDENTITAS merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Hak ini melekat sejak seseorang lahir di dunia dan diakui baik secara nasional maupun internasional. Identitas bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan kepastian hukum agar setiap orang dapat mengakses hak-haknya sebagai warga negara.

Sekretaris Komisi A DPRD DIY Syarief Guska Laksana SH mengungkapkan begitu pentingnya identitas penduduk, karena menyangkut banyak hal, termasuk terkait hak yang dimiliki serta kewajiban. Karena itu, pelayanan kependudukan ini sangat penting.

Di Indonesia, jaminan tersebut tertuang dalam sejumlah regulasi. Salah satunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Aturan ini menegaskan kewajiban pencatatan kelahiran sebagai langkah awal penentuan identitas hukum seseorang. Dari proses itulah seorang anak mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang akan melekat sepanjang hidupnya.

Setiap bayi yang lahir dan didaftarkan ke Kartu Keluarga (KK) otomatis

memperoleh NIK. Tak berhenti di situ, anak juga berhak atas Kartu Identitas Anak (KIA). Fungsi KIA hampir sama dengan KTP, hanya saja berbeda warna dan berlaku sesuai rentang usia.

Bagi anak usia 0-5 tahun, KIA diterbitkan tanpa foto. Sedangkan untuk usia 5-17 tahun, KIA sudah dilengkapi foto pemilik. Begitu sang anak menginjak usia 17 tahun atau menikah, KIA tidak berlaku lagi dan diganti dengan KTP elektronik (e-KTP) yang saat ini berlaku seumur hidup.

Proses perekaman e-KTP sendiri masih terus dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Namun sejak Desember 2022, pemerintah mulai melakukan uji coba Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau yang dikenal sebagai KTP digital.

Era Baru

IKD mulai diterapkan luas pada awal 2023, berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 yang mengatur standar perangkat keras, perangkat lunak, blanko, serta mekanisme penyelenggaraan identitas digital. Melalui IKD, data kependudukan dapat diakses langsung dari smartphone, tanpa harus membawa kartu fisik.

Syarief Guska Laksana menjelaskan, pemerintah saat ini mengakui dua jenis identitas resmi: e-KTP dan KTP digital. Secara nasional, targetnya pada tahun 2025, sekitar 30 persen masyarakat sudah menggunakan IKD.

Namun, capaian di Dae-



Sekretaris Komisi A DPRD DIY Syarief Guska Laksana SH.

Atiek Widiastuti

rah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih rendah, belum mencapai 10 persen. "Teknologi menjadi kendala utama. Selain itu, masyarakat merasa belum perlu menggunakan IKD karena e-KTP masih berfungsi," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DIY.

Padahal, DIY telah mendeklarasikan diri sebagai smart city, yang seharusnya mampu menjadi contoh penerapan teknologi kependudukan di tingkat nasional.

Dukungan Pemerintah dan Edukasi

Guska menilai, pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam sosialisasi IKD. Langkah awal bisa dimulai dari lingkup internal, seperti mewajibkan aparat sipil negara (ASN) hingga anggota DPRD menggunakan IKD untuk urusan adminis-

trasi. Ia mencontohkan, pada pelantikan anggota DPRD DIY periode 2024-2029, seluruh anggota diwajibkan menggunakan IKD untuk administrasi. Langkah serupa dapat diterapkan di perusahaan swasta, dengan mendorong karyawan melakukan aktivasi IKD.

Di perkotaan, Guska yakin kendala tidak terlalu besar karena akses internet relatif lancar. Tantangan lebih terasa di wilayah pedesaan atau pegunungan, di mana konektivitas internet masih terbatas. Selain persoalan teknologi, isu keamanan data juga menjadi ganjalan. "Masyarakat masih ragu terhadap keamanan data saat aktivasi IKD. Ini yang harus dijawab pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah harus memberi jaminan perlindungan data," jelas Guska.

Meski demikian, ia menilai aplikasi IKD sebenarnya sudah cukup bagus dan menunya bermanfaat. Jika

kekhawatiran masyarakat soal keamanan bisa dijawab, kesadaran untuk beralih ke IKD akan tumbuh dengan sendirinya.

Bagi masyarakat yang ragu karena khawatir tertipu link spam, ia menyarankan agar langsung datang ke kantor pemerintah agar mendapat pendampingan dalam proses aktivasi.

Keberhasilan KIA di DIY

Di sisi lain, Guska mengapresiasi tingginya capaian perekaman KIA di DIY yang mencapai 80-90 persen. Bahkan saat ini sebagian besar bayi lahir langsung mendapatkan KIA, baik melalui rumah sakit maupun pengurusan mandiri.

KIA bukan hanya sekadar identitas. Di DIY, pemilik KIA juga bisa memperoleh manfaat tambahan, seperti potongan harga di sejumlah supermarket, terutama untuk kebutuhan sekolah dan alat tulis.

Keberhasilan ini tidak lepas dari adanya regulasi khusus, yakni Perda DIY Nomor 9 Tahun 2015 ten-

gtag=gs-lte-wp-tagmanager-site-id=

tag=gs-lte-wp-tagmanager-site-id=

Salah satunya, adanya kapanewon/kalurahan yang tidak memiliki data update data adminduk. Hal ini terjadi karena ada sebagian warga sudah mengurus ke dinas kabupaten/kota sehingga tidak mengurus atau melapor ke kapanewon/kalurahan. Padahal data adminduk penting untuk dimiliki oleh pemerintah tingkat kapanewon dan kalurahan.

"Data kependudukan sifatnya dinamis. Perubahannya cepat, bisa bertambah atau berkurang. Apalagi di DIY banyak pendatang, baik untuk kuliah maupun bekerja. Perpindahan ini harus tetap tercatat," kata Guska.

Temuan lain adalah keterbatasan personel di tingkat kalurahan/kelurahan dan kapanewon. Banyak petugas Adminduk yang sudah berusia lanjut sehingga kesulitan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Kekurangan tenaga juga membuat layanan belum maksimal.

Meski demikian, Guska mengapresiasi adanya wilayah yang proaktif dengan jemput bola. Ada kapanewon yang membuka layanan hingga malam, akhir pekan, bahkan hari libur,

agar warga yang sibuk di jam kerja tetap bisa mengurus dokumen kependudukan.

Identitas sebagai Jati Diri Bangsa

Identitas bukan hanya sekadar nomor atau kartu plastik. Ia adalah jati diri setiap warga negara, pintu masuk untuk memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga layanan publik lainnya. Tanpa identitas yang jelas, warga rentan kehilangan hak-haknya.

Di era digital, tantangannya bukan hanya memiliki identitas, tetapi juga menjamin keamanan dan pemanfaatannya. KTP digital yang kini dikembangkan merupakan langkah maju, namun butuh waktu agar masyarakat terbiasa.

Sosialisasi, edukasi, serta jaminan keamanan data menjadi kunci agar masyarakat tidak ragu beralih dari identitas fisik ke digital.

Harapan ke Depan

Komisi A DPRD DIY berharap, pemerintah daerah lebih serius dalam memperkuat layanan Adminduk, baik di tingkat kabupaten/kota maupun kalurahan. Dukungan infrastruktur teknologi, pelatihan SDM, hingga regulasi yang jelas akan sangat menentukan keberhasilannya.

"Identitas adalah hak mendasar warga negara. Maka layanan Adminduk harus profesional, dinamis, dan menjamin kepastian hukum," tegas Guska.

Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dukungan teknologi, DIY diharapkan tidak hanya menjadi daerah dengan capaian KIA yang tinggi, tetapi juga mampu menjadi role model penerapan identitas digital di Indonesia. (Awh)-d

Simak juga wawancara di :

krjogja.com



krjogja.com



Kedaulatan Rakyat @Krdjogjadotcom



KedaulatanRakyat Kedaulatan rakyat Media



YouTube Kedaulatan Rakyat TV



Nenek Tugiyem Depresi, Nekat Bakar Rumah

KARANGANYAR (KR) -Seorang wanita usia 80 tahun asal Dukuh Mundu Rt 03/Rw VI Desa Selokaton Gondangrejo Karanganyar Jateng, Tugiyem diduga sengaja membakar rumahnya, Selasa (30/9) siang. Ia juga beberapa kali mencoba mengakhiri hidupnya karena depresi hidup sebatang kara.

Kasi Humas Polres Karanganyar Iptu Mulyadi mengatakan rumah yang ditempatinya itu tinggal menyisakan puing-puing dan barang hangus usai kebakaran melanda. Api muncul diduga dari kasur yang sengaja dibakar korban.

"Diduga api berasal dari kasur di dalam kamar yang sengaja dibakar oleh korban," kata Mulyadi.

Keterangan dari para tetangga, korban sengaja membakar rumahnya karena depresi. Selama ini ia tinggal sebatang kara. Ia sesekali ditengok keponakannya dari jauh. Saat rumah terbakar, nenek Tugiyem hanya berdiam di dalam rumah tanpa mencoba menyelamatkan diri. Ia dibopong keluar rumah oleh tetangganya yang menyadari korban masih di dalam keupungan api.

Selanjutnya warga menghubungi Petugas Polsek Gondangrejo, Damkar dari Kota Surakarta dan Kab Karanganyar. Tidak lama kemudian api dapat dipadamkan.

Kadus Mundu Ali mengatakan nenek Tugiyem sudah lama sebatang kara. Selain pikun, dia juga kesepian. Beberapa kali percobaan bunuh diri digagalkan tetangga. "Beruntung dia kali ini diselamatkan dari kebakaran. Kabarnya memang si nenek yang menyulut api kali ini," katanya.

Kasi Damkar PP Satpol PP Kabupaten Karanganyar Efan R Pratama api itu membakar habis rumah yang dihuni Tukiye. Dia mengatakan kerugian yang ditimbulkannya dari kebakaran itu mencapai ratusan juta rupiah. "Akibat kejadian tersebut, 1 bangunan rumah dengan nilai sekira Rp 250 juta hangus terbakar," kata dia. **(Lim)-f**

SIDANG PENGANIAYAAN PEREMPUAN ADVOKAT

Terbakar Cemburu, Terdakwa Berupaya Damai

BANTUL (KR) - NTA (41) terdakwa kasus penganiayaan advokat perempuan memberikan keterangan sambil terisak menahan tangis. Perempuan warga Pandak Bantul ini mengaku sudah punya firasat suaminya, YH berselingkuh. Walau berusaha menepis perasaan itu, namun akhirnya dia tidak bisa menahan diri lagi ketika melihat suaminya makan berdua bersama korban HOS.

"Waktu itu Selasa (29/4) pukul 12.30 di Waroeng Steak Jalan Bantul, Kapanewon Sewon, saya marah apalagi wanita itu (HOS) memanggil suami saya dengan kata "Sayang" hingga saya terprovokasi untuk menjambak, melempar air, dan botol kepada korban tetapi saya tidak merasa mencakar," ungkap NTA di depan Majelis Hakim dengan Ketua Silvera Sinthia Dewi SH, Senin (29/9) sore di PN Bantul

Setelah kejadian itu NTA sudah berusaha meminta maaf kepada korban HOS yang berprofesi advokat dan suaminya, seorang polisi agar kasus ini

tidak dilanjutkan laporan polisi. "Awalnya sepakat damai, dan saya bersedia memberi kompensasi hingga Rp 5 juta dan sudah di transfer. Tetapi korban menolak mintanya Rp 70 juta dan diturunkan jadi Rp 50 juta," papar NTA.

NTA yang mengaku telah berdamai dengan suaminya dan melanjutkan mahligai rumah tangga mengaku tidak sanggup memenuhi permintaan korban hingga akhirnya kasus ini sampai di meja hijau. "Saya hanya sanggup menambah Rp 2 juta atau total Rp 7 juta," ungkap NTA didampingi penasihat hukum Hapsari Budi Pangastuti SH yang juga



KR-Juvintarto

Terdakwa dan suami bersama penasihat hukum dan saksi ad charge usai sidang di PN Bantul.

owner Kantor Hukum AH & Partner's di Maguwo.

Sebelumnya tiga saksi ad charge (meringankan) dihadirkan yaitu Deni Indrawan dan Ririn Apriliani keduanya rekan kerja NTA, serta Danang teman kerja YH (suami) NTA. "Kami turut mendampingi terdakwa saat

hendak minta maaf ke korban tetapi ditolak," ungkap Ririn.

Demikian pula Deni menyebutkan terdakwa selama ini dikenal baik dan sudah punya itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. "Tidak ada niat jahat dari terdakwa hanya berusaha mem-

pertahankan mahligai rumah tangga, kami sampaikan saat suami korban mendatangi kantor kami," ucap Deni

Sementara Danang, teman YH mengetahui permasalahan keluarga YH dan turut mendorong agar YH rukun kembali dengan NTA. **(Vin)-f**

Kemenhaj Ingin Masa Tunggu Haji Nasional 26 Tahun

JAKARTA (KR) - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan perhitungan kuota haji per provinsi ke depan akan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang, sehingga rata-rata masa tunggu nasional merata pada kisaran 26-27 tahun.

"Jadi mungkin nanti ada banyak perubahan mungkin ada daerah atau provinsi yang naik jumlah jemaah hajinya tapi ada juga yang turun," ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Selasa (30/9).

Menurutnya, selama ini alokasi kuota haji antarprovinsi dianggap dilakukan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bahkan, Badan Pe-

meriksa Keuangan (BPK) telah beberapa kali merekomendasikan agar Pemerintah melakukan evaluasi terhadap metode perhitungan kuota tersebut. "BPK berulang kali merekomendasikan bahwa perhitungan kuota per provinsi selama ini tidak merujuk pada UU. Karena itu, mulai sekarang, perhitungan harus kembali ke dasar hukum," kata Dahnil.

Ia menjelaskan, dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disebutkan bahwa kuota haji ditentukan berdasarkan dua faktor utama, yakni jumlah penduduk muslim per provinsi dan jumlah daftar tunggu (waiting list). "Jadi perhitungannya mengacu pada dua hal, jumlah

penduduk muslim dan jumlah daftar tunggu. Bisa digunakan salah satu, atau gabungan keduanya," katanya.

Dengan pendekatan ini, Dahnil optimistis waktu tunggu haji di berbagai daerah bisa menjadi lebih merata. "Kalau menggunakan daftar tunggu sebagai dasar, maka rata-rata nasional masa tunggunya sekitar 26-27 tahun. Tidak ada lagi provinsi yang harus menunggu hingga 40 tahun," katanya.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, Pemerintah tengah meminta persetujuan DPR terkait pembagian kuota haji yang telah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi sebesar 221.000 orang.

(Ant/San)-d

Asrama Ponpes Zaid Bin Tsabit Terbakar

TEMANGGUNG (KR) - Sebuah Gedung Asrama Pondok Pesantren (Ponpes) Zaid bin Tsabit di Karangsari RT 04 RW 01, Kelurahan Manding, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, terbakar, Selasa (30/9) sore. Sumber di lokasi kejadian menyebutkan, kebakaran terjadi sekitar pukul 15.40 WIB mengakibatkan Tri Hermawanto (44), pemilik dan Pengasuh Ponpes Zaid bin Tsabit mengalami sejumlah kerugian.

Sore itu, Pengasuh Ponpes, Fathan Fadhlila bersama guru lainnya sedang melaksanakan seminar di Ruang Utama Ponpes, kemudian mencium bau barang terbakar. Saat memeriksa luar gedung, terlihat api dan asap membubung ke udara dari salah satu bangunan asrama santri.

Saksi kemudian meminta pertolongan rekan-rekannya dan mencoba memadamkan api dengan alat seadanya serta menghubungi pihak Pemadam Kebakaran, Kepolisian dan pihak terkait. Kapolsek Temanggung AKP Sigit bersama sejumlah anggota dan petugas Pemadam Kebakaran turut memadamkan api bersama masyarakat.

Sigit mengatakan, selain membakar satu gedung asrama, barang-barang lainnya yang ikut terbakar antara lain televisi, kulkas, dispenser, sepeda onthel, lemari dan kasur. "Asrama yang terbakar tersebut terdiri satu ruangan berukuran 5x7 meter yang terbuat dari papan kayu, atap dari metal pasir, lantai keramik," katanya.

Menurut Sigit, penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dan luka pada kejadian tersebut. Sementara Kepala Seksi (Kasi) Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Kebakaran Dinas Satpol PP dan Damkar Temanggung Edi Irwanto mengatakan, pihaknya mengerahkan dua armada dengan enam personel. "Api berhasil dipadamkan, kerugian mencapai Rp 300 juta, sedang gedung yang terselamatkan mencapai Rp 2 miliar," sebutnya.

Dikemukakan, sebelum kebakaran, santri sedang melakukan rapat dan terjadi pemadaman listrik. Saat listrik menyala terjadi kegagalan instalasi listrik yang mengakibatkan percikan api, hingga merembet ke benda di sekitarnya.

(Osy)-d

Sri Purnomo Sambungan hal 1

Modus yang dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2020 tentang pedoman pemberian hibah pariwisata tanggal 27 November 2020. Aturan tersebut mengatur tentang alokasi hibah dan membuat penetapan penerima hibah pariwisata, yaitu kelompok masyarakat di sektor pariwisata di luar dari desa wisata dan desa rintisan wisata yang telah ada. "Berdasarkan audit penghitungan BPKP DIY, kerugian negara mencapai Rp 10.952.457.030," paparnya.

Guru Dapat . . . Sambungan hal 1

makanan yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan prioritas kepada guru bantu dan honorer. Selain itu menggunakan sistem rotasi harian agar pelaksanaan lebih merata.

"Melalui kebijakan tersebut, BGN berharap motivasi guru semakin meningkat, sehingga peran mereka dalam memastikan kelancaran distribusi MBG serta peningkatan status gizi anak bangsa dapat berjalan optimal," tambah Nanik. **(Ant/Has)-f**

Bambang. Untuk saksi-saksi yang telah dipanggil, Bambang menyebutkan ada kurang lebih 300 orang. Saksi itu berasal dari dinas maupun pihak-pihak terkait. Penyidik masih terus mendalami keterangan saksi-saksi lain untuk menelusuri keterlibatan pihak lainnya. "Perkara ini masih terus kami kembangkan. Keterangan saksi-saksi terus gali untuk mengetahui apakah ada keterlibatan orang lain atau tidak," tegasnya.

Terpisah, Jogja Corruption Watch (JCW) meminta Kejari Sleman untuk meluaskan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata tahun 2020, yang

menjerat eks Bupati Sleman, Sri Purnomo (SP). JCW juga mendorong Kejari Sleman untuk membongkar keterlibatan pihak lainnya dalam perkara ini. Hal ini penting sehingga kasus ini menjadi terbuka atas keterlibatan pihak lain atas kasus dana hibah pariwisata Kabupaten Sleman tahun 2020 itu.

"Karena konteksnya adalah terkait dana hibah, mustahil hanya melibatkan satu orang saja yakni SP. Pasti ada simpul aktornya. Jika ada petunjuk yang melibatkan pelaku lainnya, harus dikejar oleh Kejari Sleman. Jangan hanya berhenti di tersangka SP saja," tandasnya. **(Sni/Zie)-f**

SEBELUM BERPACU DI MANDALIKA

Marc Marquez Temui Presiden Prabowo di Istana

JAKARTA (KR) - Juara Dunia MotoGP musim 2025 sekaligus pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (30/9), sebelum berpacu di ajang MotoGP Indonesia 2025, Jumat-Minggu (3-5/10) di Sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Halo semuanya. Saya sangat senang bisa kembali ke Indonesia setelah menjadi Juara Dunia tiga hari yang lalu. Dan, ya, ini akan menjadi GP pertama, sirkuit pertama setelah menjadi juara," kata Marquez saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Marquez tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 16.30 WIB melalui pintu di Jalan Medan Merdeka Utara. Pertemuan Marquez dengan Presiden Prabowo Subianto berlangsung selama sekitar satu jam.

Usai pertemuan, Marquez yang mengenakan polo shirt merah resmi Ducati, keluar dari Istana Kepresidenan didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan dua pembalap muda Indonesia, Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama, yang turut hadir dalam pertemuan bersama Presiden.

Marquez tiba di Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-

Hatta, Tangerang, Banten pada Senin (29/9) petang, berdasarkan unggahan dalam cerita Instagram pribadinya @marcmarquez93.

Seri balapan MotoGP Mandalika 2025 berlangsung akhir pekan ini di Sirkuit Pertamina Mandalika, diawali dengan latihan pada Jumat (3/10), kualifikasi dan sprint race pada Sabtu (4/10), hingga balapan utama pada Minggu (5/10).

Balapan ini akan menjadi momen ketiga penampilan Marquez di Mandalika. Pada dua edisi sebelumnya, rider dengan julukan The Baby Alien itu gagal menuntaskan balapan.

(Ant/San)-d

Pancasila Sambungan hal 1

Relevansi 1 Oktober tidak terletak pada sejarahnya, melainkan pada keampuhannya menjawab tantangan disintegrasi yang berwujud hoaks, polarisasi, dan politik identitas. Inilah ujian terberat bagi Pancasila: menjadi jangkar di tengah arus globalisasi yang tak terbatas.

Tantangan terbesar Pancasila kini bersembunyi di balik layar gawai. Jika G30S menyerang fisik jenderal, era digital menyerang kohesi psikologis bangsa. Kita menghadapi tiga krisis utama yang mengancam fondasi Pancasila:

Pertama, Radikalisme dan intoleransi senyap. Ruang digital telah menjadi ladang subur penyebaran paham eksklusif yang bertentangan dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kelompok ekstremis memanfaatkan anonimitas internet untuk menyebar kebencian, menolak kemajemukan, dan mendegradasi toleransi sebagai nilai kebangsaan.

Kedua, Polarisasi sosial. Kontestasi politik telah meninggalkan luka serius berupa fragmentasi sosial yang terlampau tajam. Warga cenderung berkelompok dalam berbagai ideologi, saling mencera, dan kehilangan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Nilai tenggang rasa terkikis, digantikan oleh perundungan siber, menggerogoti Sila Persatuan Indonesia.

Ketiga, Disintegrasi etika elit. Kepercayaan publik terhadap demokrasi

dan hukum berada di titik kritis. Isu korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik oligarki yang seolah kebal hukum adalah pukulan telak bagi Sila Keempat dan Kelima. Ketika para pemangku kebijakan menjauh dari hikmat kebijaksanaan dan menampakkan ketidakadilan, rakyat akan mempertanyakan Kesaktian Pancasila itu sendiri.

Untuk mengatasi badai digital ini, Pancasila harus direaktualisasi dari sekadar teks menjadi aksi kolektif. Kesaktian Pancasila di era sekarang terletak pada daya transformasinya.

Di tengah polarisasi, kita harus kembali pada fondasi kemanusiaan. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut kita untuk bersikap beradab dalam setiap interaksi. Sementara Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, harus diwujudkan melalui pengorbanan kolektif.

Sebagaimana Bapak Bangsa, Soekarno, pernah menegaskan bahwa lima sila tersebut dapat diperoleh menjadi satu kata sakti: "Jikalau saya memeras lima sila menjadi tiga, dan tiga menjadi satu, maka saya mendapatkan satu kata Indonesia tulen, yaitu Gotong Royong" (Pidato 1 Juni 1945).

Gotong Royong inilah yang menjadi antivirus paling ampuh terhadap polarisasi. Gotong Royong mendesak kita untuk bergerak dari individualisme menuju kebersamaan, baik di lingkungan fisik maupun di dunia maya.

Sila Keempat menuntut pengambil-

an keputusan yang rasional dan mengutamakan kemaslahatan rakyat. Ketika musyawarah digantikan oleh transaksi politik, Kesaktian Pancasila mulai luntur.

Sila Kelima, Keadilan Sosial, bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adalah kunci penutup. Tanpa keadilan yang merata, persatuan akan rapuh. Pengamalan sila kelima di era modern harus diwujudkan melalui pemerataan akses digital, kesempatan ekonomi yang sama, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober harus menjadi titik tolak untuk sebuah revolusi kesadaran. Kesaktian sejati Pancasila bukan terletak pada kemampuan negara menumpas pemberontakan, melainkan pada kemampuan Pancasila menumbuhkan etika dan karakter yang kuat di tengah gempuran zaman.

Hal ini membutuhkan peran kolektif dari elit politik sebagai teladan antikorupsi, sistem pendidikan yang menanamkan karakter kritis dan empati, serta generasi muda yang menjadi agen filter dan penyebar persatuan di ranah digital.

Membulatkan tekad untuk mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila adalah harga mati. Pancasila telah teruji; kini giliran kita untuk membuktikan bahwa kita layak menjadi pewarisnya. -f

(Penulis, Dosen Universitas Sanata Dharma)



Prakiraan Cuaca Rabu, 1 Oktober 2025						
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Sleman	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wates	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wonosari	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
☀️ Cerah ☁ Berawan 🌫 Udara Kabur 🌀 Hujan Lokal 🐛 Hujan Peleir						